

## KAJIAN KRITIS FAIRCLOUGH DALAM ULTIMATUM KAPOLRI TITO ATAS SIKAP EKO PATRIO MENGENAI KASUS BOM PANCI

Rizka Kurnia Ayu

Kajian Sastra dan Budaya, Universitas Airlangga,

Jalan Dharmawangsa Dalam 29, Kampus B Surabaya, Indonesia

e-mail : HYPERLINK "mailto:rizkakurniaayu22@gmail.com" [rizkakurniaayu22@gmail.com](mailto:rizkakurniaayu22@gmail.com)

### ABSTRACT

*Discourses that appear in text and conversation are not neutral. It is a form of subjectivity that leads to power struggles. Such as the discourse of "Bomb Pan" as the diversion issues on the Ahok case which was heralded by Eko Patrio, which was then responded by the Chief of Police Tito who was in charge of handling the bomb pan case together Densus 88. Police Chief against Eko delivered in ultimatum form that finally made Eko doing a series of strange such as transforming himself from a suspect to a victim of online media libel. Changes in Eko's attitude due to Tito's ultimatum made the researcher interested in analyzing the contents of the Ultimatum. Through Fairclough's critical discourse (textual analysis, discursive practice, and social praxis) it was found that the Chief of Tito's decree using the modalities of service negotiation to generate symbolic power over its performance as a police chief can not be doubted and must be obeyed by anyone including political institutions.*

**Keywords:** *discourse; discursive practice; police's statements; social praxis.*

### 1. Pendahuluan

Kekuasaan merupakan konteks yang hampir tidak bisa dipisahkan dari setiap wacana. Dominasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah yang oleh Gramscian sering disebut sebagai hegemoni pada akhirnya memberikan sumbangan besar pada analisis wacana kritis. Gagasan tentang "kritis" itu sendiri diambil dari *mazhab frankfurt* yang meyakini bahwa proses budaya berdampak pada kehidupan sosial dan merupakan usaha melawan dominasi dan ketidakadilan. Dengan menggunakan bahasa sebagai medianya hendak dilukiskan tentang kekuasaan dan perjuangan kekuasaan yang mengandalakan bentuk persetujuan atau pengorganisasian konsensus yang dibangun tanpa adanya koersi, yang kemudian dalam analisis kritis landasannya adalah teks berkonteks pertarungan kekuasaan.

Dalam analisis wacana kritis, konteks kekuasaan inilah yang kemudian berusaha untuk ditelanjangi mengingat tidak satupun wacana yang pernah objektif atau netral. Wacana bisa jadi merupakan sebuah instrumen kekuasaan. Misalnya adanya dominasi dan eksploitasi yang dipertahankan melalui budaya ideologi yang oleh marxis dijadikan sebagai sorotan utama dalam aspek budaya dalam kehidupan sosial, wacana patriarki dalam isu seksisme, dominasi antara penguasa terhadap rakyat, kaum pemilik modal dengan kaum buruh, dan berbagai contoh bentuk pertarungan kekuasaan lainnya.

Fakta tersebut mendorong analisis wacana kritis (AWK) tidak hanya membatasi diri pada detail teks atau struktur wacana saja, tetapi juga menghubungkannya dengan kekuasaan yang biasanya menghubungkan berbagai kubu baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, media, dan sebagainya.

Penelitian semacam ini, yang menggunakan wacana kritis untuk mengungkap ideologi atau kekuasaan yang tengah dikonstruksi oleh pihak-pihak tertentu melalui pemunculan statement atau pernyataan, cukup banyak dilakukan. Seperti penelitian yang berjudul *Citra Politisi Lokal Dalam Iklan Politik {Analisis Wacana Citra Mardjoko – Husein (Marhein) Dalam Iklan Politik Di Banyumas Televisi (Bmstv) Pada Pilkada Banyumas Tahun 2008}* oleh Resti Fauriana, Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana sebuah iklan partai politik memunculkan citra politik lokal. Penelitian lainnya *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Hukum Dalam Majalah Tempo Edisi Juli 2012* oleh Nopita Desiana, penelitian ini berhasil mengungkap ideologi dan gaya bahasa koran tempo dalam memberitakan kasus hukum di Indonesia.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Alfi Syahriyani dengan judul *Retorika Hubungan Amerika Serikat dan Indonesia dalam Pidato Obama di UI: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi ini mencoba untuk melihat bagaimanakah hubungan yang sesungguhnya ada antara Indonesia dan Amerika melalui pidato yang disampaikan oleh Obama di UI. Ketiga penelitian ini memiliki kesamaan yakni berusaha untuk mengungkap hal-hal yang tersembunyi dibalik sebuah wacana. Pembeda antara penelitian satu dengan yang lain terletak pada makna apa yang hendak dikorek darinya entah itu ideologi, kekuasaan, ataukah spesifikasi yang membedakan objek mereka menjadi unik dan berbeda dengan objek lainnya. Demikian juga dengan penelitian ini yang mencoba untuk mengungkap sistem kekuasaan yang tengah beroperasi dibalik pernyataan-pernyataan penuturnya yang dalam hal ini adalah pernyataan dari kapolri Tito yang belum pernah dikaji oleh peneliti dari institusi manapun.*

Hal inilah yang menjadi kebaruan dan kemenarikan dalam penelitian ini. Dikaitkan dengan paragraf sebelumnya, terkait analisis wacana kritis yang tidak membatasi diri pada detail teks atau struktur wacana saja, tetapi juga menghubungkannya dengan kekuasaan yang biasanya menghubungkan berbagai kubu baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, media, dan sebagainya. Maka pernyataan-pernyataan Kapolri Tito, terkait dengan kasus *Bom Panci*, yang sempat ramai pada pertengahan 14-16 Desember 2016, memiliki unsur-unsur tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kapolri Tito Karnavian akibat adanya tuduhan bahwa kasus “Bom Panci” yang saat itu tengah terjadi adalah pengalihan isu semata. Pernyataan terkait kasus Bom Panci adalah pengalihan isu, muncul dari akun Twitter Eko Patrio.

Selanjutnya, kicauan Eko di *twitter* tersebut Membuat kapolri geram dan akhirnya Eko dipanggil oleh Bareskrim atas tuduhan tindak kejahatan terhadap penguasa umum atau Undang-Undang informasi dan transaksi Elektronik dan pasal 207 KUHP. Setelah pemanggilan itu, Eko selaku Ketua DPW PAN daerah Jakarta, sempat mangkir pada hari Kamis sesuai dengan jadwal pemanggilan dari bareskrim. Eko baru memenuhi panggilannya pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Setelah pertemuannya dengan Bareskrim, Eko tiba-tiba yang awalnya adalah tersangka, mencitrakan dirinya sebagai korban dan Eko menuntut media online yang memberitakannya dengan alasan pencemaran nama baik, karena Eko tidak pernah merasa menyuarakan statement semacam itu. Anehnya bukan hanya satu media yang dituntut oleh Eko, namun tujuh media online sekaligus. Bukankah ini adalah hal yang janggal. Mengapa Eko baru melakukan somasi terhadap ketujuh media online tersebut setelah bertemu dengan Bareskrim. Terlepas dari apakah benar tidaknya bahwa pernyataan terkait “Bom

Panci adalah pengalihan isu”disampaikan oleh Eko atau tidak, namun tetap saja, ada pertarungan kekuasaan yang sedang bertanding di arena perpolitikan ini

Kejanggalan ini makin diperkuat dengan adanya berbagai media yang memberitakan kegeraman kapolri Tito terhadap Eko. Sehingga citra yang saat itu muncul adalah Eko mengubah dirinya menjadi korban, karena takut dengan ultimatum yang dilantangkan oleh kapolri Tito. Maka ada indikasi jika Eko melakukan somasi terhadap tujuh media online karena memang dia ingin melakukannya namun karena takut akan ancaman kapolri Tito. Untuk mengetahui benarkah rangkaian kegiatan aneh yang dilakukan oleh Eko Patrio pasca pemanggilan dirinya oleh Bareskrim terkait erat dengan ultimatum Kapolri Tito, maka terlebih dahulu harus diketahui terkait bagaimana pernyataan-pernyataan yang diutarakan oleh Kapolri Tito atas ulah Eko tersebut.

Selanjutnya, dengan bantuan analisis wacana kritis Fairclough akan coba untuk ditemukan tentang isi ultimatum yang dibuat Kapolri Tito untuk Eko Patrio, karena tindakannya yang menganggap kasus Bom Panci adalah pengalihan isu semata atas kasus Ahok. Untuk memudahkan proses analisis guna menemukan hasil yang maksimal maka digunakanlah tiga dimensi dalam teori Fairclough yakni teks (deskripsi), praktik diskursif (interpretasi), dan juga dimensi praksis sosial (eksplanasi).

## 2. Metode

Penelitian ini mengacu pada teori analisis wacana kritis Fairclough tentang prosedur analisis wacana kritis yang tahapnya terdiri atas tiga tahapan, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Sebelum memasuki tahapan tersebut terlebih dahulu dilakukan transkripsi data berupa video berita yang disiarkan ulang di youtube berdurasi 20 menit yang isinya menunjukkan kegeraman

kapolri Tito terhadap Eko atas dianggapnya *Bom Panci* sebagai pengalihan isu. Youtube sengaja dipilih karena yang dibutuhkan oleh peneliti adalah pernyataan langsung, bukan pernyataan tidak langsung yang biasanya dimunculkan dalam media tulis online. Proses transkripsi kemudian dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yakni deskripsi yang berfokus pada aspek linguistik. Aspek linguistik yang dijadikan fokus utama adalah modalitasnya. Hal ini dikarenakan pernyataan kapolri Tito lebih mengarah pada bentuk modalitas. Lebih jauh tentang modalitas akan dijelaskan pada bab pembahasan. Modalitas ini nantinya akan digunakan untuk melihat pernyataan kapolri Tito ini menandai atau mengkonstruksi hal seperti apa.

Proses selanjutnya yakni interpretasi, Haryatmoko menyebutnya dengan analisis produksi karena memang interpretasi lekat dengan bagaimana suatu teks diproduksi. Tahapan ini berkaitan dengan teks sebagai praktik diskursif. Dengan kata lain peneliti akan melihat teks sebagai hal yang diproduksi oleh pihak atau sistem tertentu. Pertanyaan yang biasanya berkaitan dengan pembahasan ini adalah siapakah yang terlibat, apakah yang terjadi, bagaimana hubungannya, serta bagaimanakah fungsi bahasa pada teks tersebut. Selanjutnya baru ditentukan interpretasi teksnya berdasarkan hubungannya dengan interpretasi konteks tersebut.

Proses analisis terakhir dalam penelitian ini adalah eksplanasi. Hal ini mengarah pada terbentuknya praksis sosial yang biasanya tertanam dalam tujuan, jaringan dan praksis budaya sosial yang luas. Dalam pemahaman ini sudah mulai masuk pemahaman intertekstualitas, peristiwa sosial di mana kelihatan bahwa teks dibentuk oleh dan membentuk praksis sosial. Pertanyaan yang muncul pada tahap ini biasanya adalah apa yang membantu terbentuknya sebuah wacana yang

berhubungan dengan penentuan sosial yang meliputi level situasional, institusional dan kemasyarakatan. Sedangkan pada level ideologi, pertanyaan yang muncul adalah elemen apa yang digambarkan memiliki muatan ideologis.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kasus Bom Panci sebagai

##### Pengalihan Isu atas Kasus Ahok

Konteks dalam penelitian ini adalah pengalihan isu. Dikaitkan dengan tiga dimensi konteks yakni *field*, *tenor*, dan *mode* maka diketahui jika yang menjadi *field* (hal yang terjadi) adalah kegeraman kapolri Tito atas sikap Eko yang terkesan meragukan kinerjanya. Sedangkan yang menjadi *tenor* dalam penelitian ini mengarah pada partisipan yang tengah berseteru yakni kapolri Tito sebagai pemberi tanggapan serta Eko sebagai si pembuat isu. Adapun dimensi yang ketiga ialah *mode* (cara). *Mode* yang ditempuh oleh kapolri Tito (sebagai partisipan utama) dalam menanggapi kasus Eko adalah menanggapi isu pengalihan tersebut dengan menggunakan diksi-diksi yang isinya tegas dan memunculkan makna keharusan. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas secara terpisah melalui aspek modalitas sebagai fokus bahasan pada tataran linguistik. Tiga dimensi ini, *field*, *tenor*, dan *mode* akan memudahkan ditemukannya inti dari permasalahan yang akan dikaji.

#### 3.2. Modalitas Negosiasi Servis dalam Pernyataan Kapolri Tito (analisis pada tataran linguistik-semantik)

Mengacu pada konsep utama teori analisis wacana kritis fairclough yang terdiri dari teks (deskripsi), praktik diskursif (interpretasi), dan praksis sosial (ekplanasi) menunjukkan bahwa dimulainya analisis haruslah mengacu pada teksnya terlebih dahulu. Tahapan awal atau berfokusnya kajian pada teks ini adalah tahapan deskripsi yang berfokus pada aspek linguistiknya. Pada pernyataan

Kapolri Tito (KT), aspek yang dominan adalah modalitas negosiasi servis. Modalitas itu sendiri ialah suatu keterangan dalam kalimat yang mengacu pada sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan atau lawan bicaranya (Chaer, 1994). Sedangkan negosiasi servis adalah pernyataan yang memiliki derajat menuntut, menegaskan, atau mengharuskan.

Hal ini berbeda dengan negosiasi informasi, yakni pernyataan yang isinya cenderung menginformasikan saja. Pernyataan KT dalam mengultimatum Eko Patrio ini dapat dikategorikan dengan modalitas negosiasi servis, karena KT menuntut sebuah layanan dalam bentuk keharusan atau bentuk kepatuhan atas kekuasaan yang dimilikinya. Untuk memudahkan pemahamannya perhatikan pernyataan KT di bawah ini, pernyataan semacam ini isinya bukan mempertanyakan tentang kebenaran, melainkan tuntutan adanya klarifikasi dan juga permintaan bukti kepada Eko, si tertuduh.

"Artinya begini, apakah saudara Eko mengeluarkan pernyataan itu, ada yang katakan ya. Yang bersangkutan mengatakan tidak. Kita klarifikasi, *kalau tidak ya klarifikasi. Kalau iya ya sebaiknya tunjukan bukti apakah betul ini memang pengalihan isu.*"

Percakapan ini diawali KT dengan memberikan pernyataan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang ditemukan di instagram dengan keterangan langsung dari si pembuat isu. Melalui pernyataan ini diketahui bahwa si pembuat isu haruslah memberikan bukti nyata terkait pernyataan yang telah dibuatnya. Kata "harus" dalam kutipan di atas diungkapkan dengan menggunakan kata "*sebaiknya*". Kata *sebaiknya* memang bersifat menyarankan, namun ia juga memiliki kesan untuk harus dilakukan.

Karena dalam kata “*sebaiknya*” yang menjadi tolak ukur adalah baik dan tidak baik. Secara tidak langsung makna yang dimunculkan ialah yang bersangkutan akan terlihat baik jika mampu menunjukkan bukti dan akan menjadi tidak baik jika hanya asal bicara tanpa memunculkan bukti.

“Tapi kalau tidak punya data, ngomong sembarangan, tolonglah sebagai pejabat negara, *jangan berbicara kalau tidak ada data*. Kasihan rakyat, ngomong tanpa data, berdasarkan opini saja. Kasihan aparat kita yang bekerja keras”

Pada pernyataan berikutnya kembali ditemukan penggunaan kata *jangan*, *tidak ada*, *tanpa*, yang menunjukan unsur meminta sekaligus larangan secara tegas, bukan sekedar menginformasikan. Penggunaan kata-kata tersebut mengarah pada larangan yang sifatnya *harus* tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain kalimat ini menunjukan bahwa jika si pembuat isu mesti menunjukan bukti terlebih dahulu sebelum menciptakan sebuah isu. Sampai di sini, kapolri Tito menyalahkan Eko sebagai tertuduh yang membuat isu mengenai kasus “bom panci” yang dinggap kasus pura-pura. KT yang menangani kasus “Bom Panci” dengan serius, merasa tersinggung dengan ocehan Eko ini. KT merasa kinerjanya dalam menangani “kasus bom panci” beserta kadensus dianggap main-main dan dianggap taktik untuk meredakan dan membela Ahok.

Kedudukan KT sebagai penjaga keamanan NKRI yang cenderung tidak boleh memihak pihak manapun selain rakyat sekilas ternodai dengan ocehan Eko yang belumlah tentu Eko adalah pelakunya, karena Eko bersikeras mengaku dirinya adalah korban fitnah media online setelah menemui panggilan Bareskrim. Namun KT seperti tutup mata dengan pengakuan Eko yang mengatakan jika

dirinya adalah korban fitnah media online. KT terus memberikan pernyataan yang menyudutkan Eko seolah Eko adalah pembuat isu.

“Kalau memang itu ternyata betul ada rekayasa. Saya *perintahkan* periksa, kalau perlu pecat. Dan saya pun enggak akan segen-segan di sini. Saya pernah menjadi Kadensus, saya tau jiwa mereka, bila perlu saya sendiri akan mengundurkan diri kalau betul mereka merekayasa. Ini bener,”

Penggunaan kata *perintahkan* pada kalimat di atas juga memunculkan bentuk modalitas akan keharusan. Selain itu juga digunakan kata *bener* untuk menunjukan kesan bahwa kasus “*Bom Panci*” ini bukanlah kasus rekayasa semata, melainkan kebenaran yang tidak perlu diragukan. Melalui pernyataan KT di atas secara tidak langsung, masyarakat sedang diyakinkan oleh kata-katanya akan kasus bom panci yang memang bukanlah rekayasa.

“saya mengapresiasi bagi adik-adik densus 88. Kemudian, ada isu yang bilang ini pengalihan isu berkaitan kasus saudara Basuki Tjahja Purnama. Saya jawab dengan tegas *ini bukanlah pengalihan isu, kenapa? karena saya sudah pengalaman dari tahun 1988 menangani kasus seperti ini*”

Kalimat berikutnya yang juga mengusung tentang keharusan dimunculkan dalam pernyataan Kapolri Tito yang memberikaan penegasan bahwa dirinya sudah menangani kasus semacam ini sejak tahun 1988, Dengan mengacu pada masa kerjanya yang dapat dikatakan sudah berpengalaman selama 28 tahun menangani terorisme, maka kasus bom panci ini pun seharusnya dianggap sama seperti kasus terorisme yang pernah

ditanganinya. Pada pernyataan ini, mulai terlihat sistem kekuasaan yang tengah beroperasi. Kapolri Tito mulai memperlihatkan kedudukan yang dimilikinya sebagai simbol kekuasaan yang digunakan untuk melegitimasi masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu seperti yang dikatakan oleh si pembuat isu. Seharusnya dengan adanya pengalaman yang dimilikinya, tidaklah boleh ada isu yang muncul semacam ini.

“Rekan-rekan yang ada di Densus ini, Polri, ini **bukan** sutradara. Para tersangka yang ditangkap ini juga **bukan** aktor, **bukan** aktris yang pandai memainkan drama, “semua orang **bisa** melihat bahkan merekam yang terjadi. Jadi, sutradara hollywood, seperti apapun yang jago, tidak akan **mampu** merekayasa kasus seperti ini. Karena mereka bukan actor, ngapain juga dia pasang badan seolah mau nge-bom.

Pada pernyataannya yang terakhir, diksi yang digunakan oleh kapolri Tito untuk memberikan penegasan jika dirinya dan Densus 88 adalah benar dengan menggunakan komparasi. Diksi pada dunia perfilman seperti *aktris, actor, sutradara, drama, dan Hollywood*.

Diksi Perfilm-an	Perumpamaan Bandingan	Makna yang dimunculkan
Actor	Kapolri dan Densus 88 bukan actor	Karena kapolri dan Densus 88 bukan actor,
Aktris	Kapolri dan Densus 88 bukan aktris	bukan aktris, bukan sutradara dan bukan pembuat scenario maka tidak mungkin mereka melakukan rekayasa kasus seperti di film-film.
Sutradara	Kapolri dan Densus 88 bukan sutradara	
Skenario	Kapolri dan Densus 88 bukan sutradara	
Hollywo-od	Kapolri dan Densus 88 bukan pembuat scenario	
	Hollywood bukan arena yang berkaitan dengan pekerjaan Kapolri dan Densus 88	

Berdasarkan analisis di atas, maka diketahui jika aspek modalitas berupa negosiasi servis atau permintaan adalah hal yang dominan dalam pernyataan kapolri Tito terkait kasus *Bom Panci* yang dianggap sebagai pengalihan isu atas kasus Ahok, maka bukan tidak mungkin, jika kemudian Eko merasa tersudutkan dan menempuh jalan seperti mencitrakan diri sebagai korban, walaupun awalnya adalah tersangka. Pernyataan kapolri Tito yang demikian ini berhasil menciptakan zona bebas kritik dan anti dilecehkan oleh siapapun. Secara tidak langsung pernyataan semacam ini bersifat otoriter dan memaksa.

### 3.3. Praktik Diskursif dalam pernyataan Kapolri Tito

Praktik diskursif menyoroti wacana dengan berfokus pada bagaimana hubungan kekuasaan dimainkan. Dalam kasus ini pernyataan kapolri Tito terkait kasus “Bom Panci” yang dianggap pengalihan Isu oleh Eko, sebenarnya bertentangan dengan sistem demokrasi di Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang dikenal “*dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat*”. Sebagai kapolri, ketimbang memberikan pernyataan yang bersifat mengancam dan memaksa, harusnya kapolri Tito melakukan negosiasi informasi yang isinya menginformasikan fakta di lapangan. Bukan justru melakukan

negosiasi servis yang isinya meminta dirinya untuk dipatuhi. Terlepas dari apakah Eko adalah benar-benar tersangka atau tidak, toh pada akhirnya, setelah diminta menghadap Bareskrim untuk dimintai keterangan, Eko langsung memberikan pernyataan bahwa dirinya adalah korban media. Selanjutnya Eko membuat gugatan atau tuntutan terhadap tujuh media sekaligus.

Ada hal yang cukup menggelitik pada kasus menggugatnya Eko pada ketujuh media online tersebut yang masih dirahasiakan namanya. Bagaimana mungkin tujuh media online memberitakan hal yang sama terkait kicauan Eko di Instagram. Bukankah menurut Eriyanto Setiap media memiliki ideologi dalam pemberitaan yang biasanya disesuaikan dengan target pembaca sebagai konsumen berita. Kesamaan ideologi antara media serta pembacanya dianggap penting sebagai bagian dari legitimasi dominasi media terhadap khalayak pembaca. Selain itu bukankah seharusnya wacana dimaknai sebagai ekspresi beragam suara ketimbang tuturan satu suara ideologis yang kemudian dapat ditentukan dan diserang. Tanpa adanya tekanan, mustahil jika Eko segera mengambil keputusan untuk menggugat media setelah memenuhi panggilan Bareskrim. Situasi semacam ini menunjukkan bahwa memang ada sistem kekuasaan yang sedang beroperasi antara pihak pendominasi vs pihak terdominasi.

Seharusnya dalam kasus ini, Kapolri Tito tidak perlu mengeluarkan ultimatum yang isinya seolah menganggap Eko adalah musuh negara yang harus dibasmi. Adalah lebih baik bagi Kapolri Tito memberikan keterangan setransparan mungkin dibandingkan dengan pelontaran kalimat berdiakses satire. Dikeluarkannya bentuk ultimatum dan kalimat bernada singgung hanya akan makin menampakkan kelemahan KT akan manajemen penguasaan diri terhadap EQ.

Selain itu dalam kasus ini partisipasi dan penguatan institusi politik

(Posisi Eko sebagai DPW PAN DKI) dalam bentuk kritikan tidaklah dijadikan ancaman karena itu akan memunculkan ketidakadilan. Menurut Rawls keadilan terkait erat dengan posisi sosial yang ditempati oleh sistem politik. Eko yang berkedudukan sebagai DPR dan juga DPW PAN DKI Jakarta seharusnya berhak untuk beropini mengingat di dalam sistem demokrasi, rakyat harus punya nilai tawar yang riil. Artinya mereka harus mampu memberi imbalan pada pemerintah yang efektif dan bisa juga menjatuhkan pemerintah yang tidak kompeten atau menyalahgunakan kekuasaan (2008).

Selain itu di dalam konstitusi hukum di Indonesia, setiap warga negara Indonesia dijamin oleh pasal 28 UUD 1945 yang isinya mengatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sebagai negara multikulturalisme, hal semacam ini sangatlah rawan terjadi, namun alih-alih memberikan penjelasan dengan bijak, Kapolri Tito justru menggunakan modal kekuasaan (jabatan) untuk menekan si pembuat isu yang belum tentu benar-benar membuat isu.

### **3.4. Analisis Praksis Sosial dalam Kasus Bom Panci : Sikap Kapolri Tito adalah penjagaan atas nama baik Instansi.**

Wacana sebagai praksis sosial hendak melihat bahwa apakah peristiwa yang tengah dikonstruksi itu mempertahankan struktur sosial yang ada, mengubah, atau justru memperbaikinya. Dalam penelitian ini, setelah melalui proses analisis wacana kritis dalam tataran teks ditemukan bahwa pernyataan Kapolri Tito yang identik bermuatan modalitas bertujuan untuk negosiasi servis (permintaan), bukan sekedar negosiasi menginformasikan kepada masyarakat. Adanya negosiasi servis tersebut tak lain bertujuan untuk tetap melanggengkan kekuasaannya sebagai

seorang kapolri yang bercitra positif. Tubuh polri yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan negara tidak boleh dicitrakan sebagai institusi yang subjektif. Dengan adanya pengalihan isu, otomatis kapolri dan Densus 88 akan dianggap sebagai pihak yang terlibat dan cenderung pro Ahok.

Selain itu, kepolisian sendiri tidak terlalu mendapatkan rasa percaya dari masyarakat akibat banyaknya manipulasi kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu di kepolisian yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pernyataan yang disampaikan oleh kapolri Tito terkait kasus bom panci yang dianggap pengalihan isu seperti sengaja dibuat memaksa dan bernada ancaman sekaligus paksaan (lihat hal 4-6). Hal ini tidak lain menunjukkan efek jera di masyarakat, agar di kemudian hari tidak ada yang berani melakukan pelecehan terhadap kinerja Polri.

Hal lain yang hendak dikuatkan oleh kapolri Tito selain kehormatan Polri di mata masyarakat ialah adanya judgment bahwa Eko Patrio yang dulunya adalah seorang actor, yang identik dengan bermain peran, selayaknya tidak perlu menyamakan peristiwa semacam ini sebagai lelucon semata. Jika kita kembali menyelami pernyataan kapolri Tito bagian ini.

“Rekan-rekan yang ada di Densus ini, Polri, ini bukan **sutradara**. Para tersangka yang ditangkap ini juga bukan **aktor, bukan aktris** yang pandai memainkan **drama**, “semua orang bisa melihat bahkan merekam yang terjadi. Jadi, **sutradara hollywood**, seperti apapun yang jago, tidak akan mampu merekayasa kasus seperti ini. Karena mereka bukan **aktor**, ngapain juga dia pasang badan seolah mau nge-bom”.

Maka akan diketahui bahwa bukanlah tanpa alasan kapolri tersebut menggunakan diksi tersebut untuk

memberikan sindirian terhadap si pembuat isu yang sebelum menjabat sebagai DPR, semula adalah seorang artis. Secara tersirat, pernyataan kapolri Tito semakin melegitimasi bahwa mereka yang hidup di dunia artis, selalu identik dengan hal-hal yang merekayasa dan hal itu tidak bisa diterapkan di dunia perpolitikan tanah air, apalagi yang bisa membawa isu perpecahan. Dengan tidak bisa diterapkan di dunia perpolitikan, maka pernyataan ini mengarahkan kita pada pemahaman bahwa sebaiknya, mereka yang aktor atau aktris tidak seyogyanya menganggap panggung perpolitikan tanah air seperti panggung sandiwara yang bergabung hanya dengan bermodal ketenaran sama (artis).

#### 4. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka diketahui jika sikap kapolri Tito dalam mengultimatum Eko sebagai terdakwa pembuat isu “bom panci adalah pengalihan kasus Ahok”, menggunakan pernyataan dengan modalitas negosiasi service yang isinya menuntut dan mengharuskan bahwa kinerjanya sebagai Kapolri tidaklah boleh diragukan. Selain itu Kapolri Tito juga mencitrakan dirinya sebagai penguasa yang harus dipatuhi oleh siapapun termasuk oleh instansi politik.



### Daftar Pustaka

- Ellyawati, H. C., 2011. Analisis Wacana Kritis Teks Berita Kasus Terbongkarnya Perlakuan Istimewa terhadap terpidana Suap Arthalyta Suryani pada Media Online. *THE MESSENGER*, Volume Volume III, p. Nomor 1. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Prees.
- Haryatmoko, 2016. Analisis Wacana Kritis: Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kellner, D., 2010. Budaya Media: Cultural Studies, Identitas, dan Politik: Antara modern dan postmodern. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rawls, J., 1971. A Theory of Justice. London: Oxford University Press.
- Wiggerhaus, R., 1994. The frankfurt school: Its History, Theories, and Political Significance, Translated by M. robertson. Cambridge: Polity Pres
- Eriyanto, 2002. Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media. Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto, 2012. Analisis wacana: pengantar analisis teks media. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N., 1989. Language and Power. London : Longman.
- Halliday dan R. Hasan, 1992. Bahasa, Konteks dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial. (Terjemah: Barori) ed.
- Fauriana, Resti. 2009. Citra Politisi Lokal Dalam Iklan Politik {Analisis Wacana Citra Mardjoko – Husein (Marhein) Dalam Iklan Politik Di Banyumas Televisi (Bmstv) Pada Pilkada Banyumas Tahun 2008}. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas sebelas maret
- Syahriyani, Alfi. 2011. Retorika Hubungan Amerika Serikat dan Indonesia dalam pidato Obama di UI: sebuah Tinjauan analisis Wacana Kritis. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ilmu budaya Universitas Indonesia
- Sumber Non Buku**
- Desiana, Nopita. 2013. *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Hukum Dalam Majalah Tempo Edisi Juli 2012* . Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bengkulu.
- <https://www.youtube.com/watch?v=UmwPoWduB1A>. video Kapolri tito. diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 19.40 WIB.
- <https://www.youtube.com/watch?v=R0EMdfi9Slo> diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 20.00 WIB.